



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KURNIAWAN ARIADI
2. Jabatan : DIREKTUR KERJA SAMA PENDANAAN BILATERAL
3. NHK : 434155

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 791.380.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m²/75 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 191.880.000
2. Bangunan Seluas 24 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m²/95 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
4. Tanah Seluas 178 m² di KAB / KOTA KUDUS, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 44.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 204.500.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. LAINNYA, POLYGON SEPEDA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 25.400.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 766.782.776**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.788.062.776

III. HUTANG Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.788.062.776

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.